

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SERTA KEMANDIRIAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2011-2018**

Andri Batara, S.AP¹⁾, Nanik Mandasari, S.IP., M.Si ²⁾, Drs. H, Amir Hasan., M.M ³⁾
Email:

andribatara6@gmail.com
nanikmandasari@gmail.com
amirhasan@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is the management of regional finances based on the level of efficiency and effectiveness as well as the independence of the Kerinci Regency in 2011-2018. From the research results, the following conclusions are obtained: 1). The financial efficiency ratio of the Kerinci Regency regional government is quite efficient. This means that the cost of collecting PAD is quite efficient with the realization of PAD revenue in Kerinci Regency on average from 2011-2018 of 85.44% or within the criteria of 80-90% (Enough Efficient) .2). The financial effectiveness ratio of the Kerinci Regency local government is less effective. This means that the realization of the Kerinci Regency PAD is smaller than the PAD target set by the Kerinci Regency local government on average from 2011-2018 of 67.96% or within the criteria of 60-80% (Less Effective). 3). The financial independence ratio of the Kerinci Regency local government is still very dependent on central transfer funds. This means that the Kerinci Regency PAD has not been able to finance local government finances. This condition can be seen from the financial independence ratio of the Kerinci Regency regional government on average from 2011-2018 of 4.76% or within the criteria of 0.00-10.00 (Very Less).

Keywords: Efficiency, Effectiveness, Independence Ratio.

ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas Serta Kemandirian daerah Kabupaten Kerinci tahun 2011-2018. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1). Rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci cukup efisien. Hal ini berarti bahwa biaya pemungutan PAD cukup efisien dengan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2011-2018 sebesar 85,44 % atau berada pada kriteria 80-90 % (Cukup Efisien).2). Rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci kurang efektif. Hal ini berarti bahwa realisasi PAD Kabupaten Kerinci lebih kecil dari pada target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2011-2018 sebesar 67,96 % atau berada pada kriteria 60-80 % (Kurang Efektif). 3).Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini berarti bahwa PAD Kabupaten Kerinci belum mampu untuk membiayai keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini terlihat dari rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci secara rata-

rata dari tahun 2011-2018 sebesar 4,76 % atau berada pada kriteria 0,00-10,00 (Sangat Kurang).

Kata Kunci : Efisiensi, Efektivitas, Rasio Kemandirian.

I. PENDAHULUAN

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik propinsi maupun kabupaten dan kota. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 yang telah direvisi UU No.32 Tahun 2004, dan mengalami revisi kembali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberi kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus anggaran daerah tersebut dengan meminimalkan campur tangan Pemerintah Pusat, dan melibatkan dua pihak : eksekutif dan legislatif yang masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD sebagai prioritas anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja modal. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan prioritas yang kemudian akan diserahkan kepada legislatif sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Peran serta pemerintah dalam mengelola, memanfaatkan dan meningkatkan kontribusi sektor-sektor perekonomiannya tentu tidak bisa lepas dari pengalokasian belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD merupakan total anggaran sebuah daerah baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi pengeluaran. Sumber dana dalam APBD berasal dari beberapa komponen utama diantaranya adalah PAD, yang bersumber dari pendapatan daerah seperti pajak langsung daerah, retribusi yang dipungut di daerah serta PAD lain yang sah. Kemudian dana transfer dari pemerintah pusat, yang terbagi dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pengalokasiannya ditujukan untuk program pemerintah pusat yang ada di daerah atau melalui usulan dari pemerintah daerah untuk kepentingan yang bisa digolongkan mendesak, seperti program rehabilitasi setelah bencana.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih tergolong rendah membuat pemerintah daerah belum bisa meningkatkan kemandiriannya yang berimbas pada pembangunan yang dilakukan di daerah yang bersangkutan sehingga masih tingginya tingkat kemiskinan yang dimiliki di daerah, karena kurangnya kesempatan kerja dan

sedikit investor yang ingin menanamkan modalnya di sebuah daerah yang belum bisa menyediakan sarana dan prasarana investasi yang memadai. Akibatnya pemerintah pusat harus rela menanggung beban pengeluaran sebuah daerah dengan kucuran dana transfer untuk menggenjot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Kuncoro, 2007:43). Maka dengan itu PAD merupakan semua penerimaan keuangan asli suatu daerah yang merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata. Suatu daerah dikatakan siap untuk melaksanakan otonomi daerah apabila PAD dapat memberikan sumbangan yang cukup untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Berlakunya UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membawa perubahan pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pendanaan. Dana perimbangan terdiri dari DAU, DAK, dan bagian daerah dari hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Yang di tuangkan dalam judul skripsi : *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2018*

II. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari metodemetode yang digunakan untuk menelusuri, mencari dan mengumpulkan data kemudian mengolah, menganalisis dan menafsirkan data yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh suatu kebenaran yang objektif. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode dalam bentuk angka (*numeric*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari data yang ada kemudian menganalisis lebih lanjut dan kemudian ditarik kesimpulan. teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen- dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Sifat Penelitian Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis kemampuan daerah

serta kinerja keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung yang diukur melalui analisis rasio yaitu rasio efektivitas, rasio kemandirian, dan rasio desentralisasi fiskal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Lama waktu penelitian \pm 2 bulan (.....) 2021.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kerinci dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci melalui situs internet: www.kerincikab.bps.go.id. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Lama waktu penelitian \pm 2 bulan. Penelitian ini dilakukan pada Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2018, dengan alasan kontribusi PAD dalam penerimaan daerah Kabupaten Kerinci masih sangat kecil dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Belanja daerah Kabupaten Kerinci masih cukup tinggi dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Jumlah penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan masih cukup tinggi, hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat masih besar.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk runtun waktu yang dimulai dari tahun 2011 sampai dengan 2018. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian atau diperoleh dari pihak ketiga berupa gambaran umum objek penelitian, realisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, realisasi belanja daerah kabupaten kerinci dan data lain yang relevan dengan penelitian ini.

Untuk memperoleh data yang valid, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kerinci dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci melalui situs internet: www.kerincikab.bps.go.id.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Sugiyono (2017:18) penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau literatur, hasil-hasil penelitian (skripsi, tesis) dan sumber-sumber lain (*web site*) yang dipublikasikan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Observasi Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lapangan, terhadap objek yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu pengolahan data dengan kaidah-kaidah matematika terhadap data angka atau numerik. Angka dapat merupakan representasi dari suatu kuantitatif maupun angka sebagai hasil dari konversi dari suatu kualitatif, yakni data kualitatif yang di kuantifikasikan.

6. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti tanpa berupa individu, adapun unit analisis yang peneliti tuangkan dalam penelitian ini adalah Analisis Efisiensi Dan

Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2018.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun data yang digunakan untuk mengetahui Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, yang diperoleh dari BKAD Kabupaten Kerinci seperti pada pembahasan berikut.

1. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Kerinci baik dalam bentuk pajak, retribusi, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Data yang berhubungan dengan PAD yaitu data target penerimaan, realisasi penerimaan dan biaya pemungutan PAD.

Target Penerimaan PAD, Target Penerimaan PAD, dan Total Biaya Pemungutan PAD di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Biaya Pemungutan PAD (Rp)
2011	34.924.903.018,83	31.537.153.761,39	21.126.264.100,33
2012	31.916.549.263,33	33.388.190.930,00	23.088.364.800,55
2013	36.444.631.039,32	40.783.693.656,00	25.070.506.154,31
2014	61.634.815.035,91	55.083.143.319,00	24.149.387.321,00
2015	37.305.246.014,89	66.598.697.406,32	32.663.719.831,40
2016	39.483.042.267,60	70.116.816.200,00	38.221.500.750,77
2017	41.056.910.855,11	77.341.561.540,60	47.840.813.354,63
2018	37.854.149.602,89	96.881.888.976,00	51.390.850.926,81

Sumber : *BPKAD Kabupaten Kerinci, Tahun 2018.*

2. Data Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan yang diperoleh dari transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Kerinci baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta dana bantuan lainnya, seperti yang terlihat pada tabel 4.4. berikut.

Dana Perimbangan di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2018

Tahun	Dana Perimbangan (Rp)
2011	498.122.506.258,83
2012	588.567.045.360,00

2013	645.257.262.357,00
2014	673.545.200.956,00
2015	657.794.535.662,00
2016	788.040.379.762,00
2017	799.918.426.092,00
2018	802.840.678.513,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Kerinci, Tahun 2018.

3. Data Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan pendapatan total yang diperoleh dari PAD ditambah dengan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Kerinci baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta jenis pendapatan dana bantuan lainnya baik dari pusat, provinsi maupun dari kabupaten/kota lain seperti yang terlihat pada tabel 4.5. berikut.

Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2018

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)
2011	630.787.178.906,66
2012	712.495.833.521,83
2013	801.644.690.794,52
2014	869.305.112.019,91
2015	940.413.159.964,89
2016	1.016.339.138.107,20
2017	1.156.659.047.638,64
2018	1.133.197.009.821,82

Sumber : BPKAD Kabupaten Kerinci, Tahun 2018.

Data-data pada tabel di atas selanjutnya dianalisis untuk mengetahui rasio keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci seperti pada sub bab berikut.

4. Analisis Data

1. Rasio Efisiensi

Analisis rasio efisiensi keuangan daerah yaitu untuk mengetahui perbandingan biaya pemungutan PAD terhadap realisasi penerimaan PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, seperti yang terlihat pada tabel 4.6. berikut.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2018

Tahun	Biaya Pemungutan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah
2011	21.126.264.100,33	34.924.903.018,83	90,29	Kurang Efisien
2012	23.088.364.800,55	31.916.549.263,33	72,33	Efisien
2013	25.070.506.154,31	36.444.631.039,32	68,79	Efisien
2014	24.149.387.321,00	61.634.815.035,91	39,18	Sangat Efisien
2015	32.663.719.831,40	37.305.246.014,89	87,55	Cukup Efisien
2016	38.221.500.750,77	39.483.042.267,60	96,80	Kurang Efisien
2017	47.840.813.354,63	41.056.910.855,11	116,52	Tidak Efisien
2018	51.390.850.926,81	37.854.149.602,89	135,76	Tidak Efisien
Rata-Rata	273.962.296.900	320.620.247.097	85,44	Cukup Efisien

Sumber Hasil Pengolahan Data Sekunder, Tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci sudah efisien. Hal ini berarti bahwa biaya pemungutan PAD sudah efisien dengan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2011-2018 sebesar 85,44 % atau berada pada kriteria (Cukup Efisien).

2. Rasio Efektivitas

Analisis rasio efektivitas keuangan daerah yaitu untuk mengetahui perbandingan realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, seperti yang terlihat pada tabel 4.7. berikut.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah
2011	34.924.903.018,83	31.537.153.761,13	110,74	Sangat Efektif
2012	31.916.549.263,33	33.388.190.930,00	95,59	Efektif
2013	36.444.631.039,32	40.783.693.656,00	89,36	Cukup Efektif
2014	61.634.815.035,91	55.083.143.319,00	111,89	Sangat Efektif

2015	37.305.246.014,89	66.598.697.406,32	56,01	Tidak Efektif
2016	39.483.042.267,60	70.116.816.200,00	56,31	Tidak Efektif
2017	41.056.910.855,11	77.341.561.540,60	53,08	Tidak Efektif
2018	37.854.149.602,89	96.881.888.976,00	39,07	Tidak Efektif
Rata-Rata	320.620.247.097	471.731.145.789	67,96	Kurang Efektif

Sumber Hasil Pengolahan Data Sekunder, Tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci sudah sangat efektif. Hal ini berarti bahwa realisasi PAD Kabupaten Kerinci lebih tinggi dari pada target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2011-2018 sebesar 67,90 % atau berada pada kriteria (Kurang Efektif).

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis rasio kemandirian keuangan daerah yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan PAD dalam membiayai keuangan pemerintah daerah jika dibandingkan dengan transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat, seperti yang terlihat pada tabel 4.8. berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah
2011	34.924.903.018,83	498.122.506.258,23	7,01	Sangat Kurang
2012	31.916.549.263,33	588.567.045.360,00	5,42	Sangat Kurang
2013	36.444.631.039,32	645.257.262.357,00	5,64	Sangat Kurang
2014	61.634.815.035,91	673.545.200.956,00	9,15	Sangat Kurang
2015	37.305.246.014,89	657.794.535.662,00	5,67	Sangat Kurang
2016	39.483.042.267,60	788.040.379.762,00	5,01	Sangat
2017	41.056.910.855,11	799.918.426.092,00	5,13	Sangat
2018	37.854.149.602,89	802.840.678.513,00	4,71	Sangat Kurang
Rata-Rata	320.620.247.097	673.545.201.003	4,76	Sangat Kurang

Sumber Hasil Pengolahan Data Sekunder, Tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini berarti bahwa PAD Kabupaten Kerinci belum mampu untuk membiayai keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini terlihat dari rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2011-2018 sebesar 4,76 % atau berada pada kriteria (Sangat Kurang)

B. Hasil Penelitian

Adapun data yang digunakan untuk mengetahui Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, yang diperoleh dari BKAD Kabupaten Kerinci seperti pada pembahasan berikut.

1. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Kerinci baik dalam bentuk pajak, retribusi, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Data yang berhubungan dengan PAD yaitu data target penerimaan, realisasi penerimaan dan biaya pemungutan PAD.

Target Penerimaan PAD, Target Penerimaan PAD, dan Total Biaya Pemungutan PAD di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Biaya Pemungutan PAD (Rp)
2011	34.924.903.018,83	31.537.153.761,39	21.126.264.100,33
2012	31.916.549.263,33	33.388.190.930,00	23.088.364.800,55
2013	36.444.631.039,32	40.783.693.656,00	25.070.506.154,31
2014	61.634.815.035,91	55.083.143.319,00	24.149.387.321,00
2015	37.305.246.014,89	66.598.697.406,32	32.663.719.831,40
2016	39.483.042.267,60	70.116.816.200,00	38.221.500.750,77
2017	41.056.910.855,11	77.341.561.540,60	47.840.813.354,63
2018	37.854.149.602,89	96.881.888.976,00	51.390.850.926,81

Sumber : BPKAD Kabupaten Kerinci, Tahun 2018.

2. Data Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan yang diperoleh dari transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Kerinci baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta dana bantuan lainnya, seperti yang terlihat pada tabel 4.4. berikut.

Dana Perimbangan di Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2018

Tahun	Dana Perimbangan (Rp)
2011	498.122.506.258,83
2012	588.567.045.360,00
2013	645.257.262.357,00
2014	673.545.200.956,00
2015	657.794.535.662,00
2016	788.040.379.762,00
2017	799.918.426.092,00
2018	802.840.678.513,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Kerinci, Tahun 2018.

3. Data Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan pendapatan total yang diperoleh dari PAD ditambah dengan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Kerinci baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta jenis pendapatan dana bantuan lainnya baik dari pusat, provinsi maupun dari kabupaten/kota lain seperti yang terlihat pada tabel 4.5. berikut.

Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011-2018

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)
2011	630.787.178.906,66
2012	712.495.833.521,83
2013	801.644.690.794,52
2014	869.305.112.019,91
2015	940.413.159.964,89
2016	1.016.339.138.107,20
2017	1.156.659.047.638,64
2018	1.133.197.009.821,82

Sumber : BPKAD Kabupaten Kerinci, Tahun 2018.

Data-data pada tabel di atas selanjutnya dianalisis untuk mengetahui rasio keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci seperti pada sub bab berikut.

C. Pembahasan

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Kerinci baik dalam bentuk pajak, retribusi, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci sudah efisien. Hal ini berarti bahwa biaya pemungutan PAD sudah efisien dengan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2011-2018 sebesar 85,44 % atau berada pada kriteria (Cukup Efisien).

Rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci sudah sangat efektif. Hal ini berarti bahwa realisasi PAD Kabupaten Kerinci lebih tinggi dari pada target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2011-2018 sebesar 67,90 % atau berada pada kriteria (Kurang Efektif).

Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini berarti bahwa PAD Kabupaten Kerinci belum mampu untuk membiayai keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini terlihat dari rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2011-2018 sebesar 4,76 % atau berada pada kriteria (Sangat Kurang).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih tergolong rendah membuat pemerintah daerah belum bisa meningkatkan kemandiriannya yang berimbas pada pembangunan yang dilakukan di daerah yang bersangkutan sehingga masih tingginya tingkat kemiskinan yang dimiliki di daerah, karena kurangnya kesempatan kerja dan sedikit investor yang ingin menanamkan modalnya di sebuah daerah yang belum bisa menyediakan sarana dan prasarana investasi yang memadai. Akibatnya pemerintah pusat harus rela menanggung beban pengeluaran sebuah daerah dengan kucuran dana transfer untuk menggenjot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Kuncoro, 2007:43).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci sudah efisien. Hal ini berarti bahwa biaya pemungutan PAD sudah efisien dengan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2011-2018 sebesar 85,44 % atau berada pada kriteria 80-90 % (Cukup Efisien).
2. Rasio efektivitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci kurang efektif. Hal ini berarti bahwa realisasi PAD Kabupaten Kerinci lebih kecil dari pada target PAD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2011-2018 sebesar 67,96 % atau berada pada kriteria 60-80 % (Kurang Efektif).
3. Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini berarti bahwa PAD Kabupaten Kerinci belum mampu untuk membiayai keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini terlihat dari rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2011-2018 sebesar 4,76 % atau berada pada kriteria 0,00-10,00 (Sangat Kurang).

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh dan LP2M STIA NUSA yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi dan mempublish jurnal di OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), dan semua pihak seperti Kabid UKM Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah serta para pelaku Usaha Kecil dan Menengah yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang bersedia memberikan data untuk peneliti ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN.
- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Ahmad, Yani. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: Grafindo
- Arsyad, S. 2012. Konservasi Tanah dan Air. Bogor: IPB Press. Edisi Kedua
- A.W. Widjaja. 2002. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga
- Boediono, (2000), Ekonomi Internasional, BFFE, Yogyakarta
- Elmi, Bachrul, 2002. Kebijaksanaan Desentralisasi Fiskal Kaitannya Dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Otonomi Daerah, Jurnal Ekonomi dan Keuangan.
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohamad, 2012, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFY-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN.
- Mardiasmo. 2011. “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta: Andi.
- Mulyanto. 2007. Pengembangan dan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi. Region, Vol. 2, No. 1, Januari 2007: 43-52.
- Pebi Julianto. 2018. Pengaruh Sistem Kearsipan Terhadap Efisiensi Kerja Pada koantor Camat Air Hangat Kabupaten Kerinci. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Mandar Maju. Bandung
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sumitro, 2004, Asas Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono. 2012. Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tamboto, F. C., Wungouw, H. I. S. & Pangemanan, D. H. C., 2015. Gambaran Visus Mata Pada Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. Jurnal e-Biomedik, September- Desember, Volume 3 (3), pp. 805-808.
- Todaro, P Michael. 2011. “Pembangunan Ekonomi”. Jakarta: Erlangga.